

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2014

ISSN: 2086-6313

**THE IMPACT OF FUEL SUBSIDY REALLOCATION:
THE SOCIAL ACCOUNTING MATRICES APPROACH**

Yuventus Effendi

**PENGARUH KEBIJAKAN MONETER
TERHADAP KINERJA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA**

Eka Budiyantri

**DAMPAK PENGGABUNGAN BURSA EFEK JAKARTA DAN BURSA EFEK SURABAYA
TERHADAP LIKUIDITAS PERDAGANGAN SAHAM DAN RASIO KEUANGAN**

Hermanto, Hermanto Siregar, Roy Sembel, dan Rita Nuralina

**KINERJA EKONOMI PANGAN NASIONAL:
DINAMIKA DAN REFORMULASI KEBIJAKAN**

Lukman Adam

JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Nidya Waras Sayekti

**DINAMIKA KEBIJAKAN DAN PENENTUAN TARIF LISTRIK PANAS BUMI:
STUDI KASUS PLTP SIBAYAK**

Ari Muliarta Ginting

DAMPAK SPILLOVER PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI KALIMANTAN

Ernawati Pasaribu, D.S. Priyarsono, Hermanto Siregar, dan Ernan Rustiadi

KRIMINALITAS: SEBUAH SISI GELAP DARI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Davy Hendri

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2014

ISSN: 2086-6313

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v-vi
Abstrak	vii-xvii
THE IMPACT OF FUEL SUBSIDY REALLOCATION: THE SOCIAL ACCOUNTING MATRICES APPROACH	
<i>Yuventus Effendi</i>	131-143
PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP KINERJA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA	
<i>Eka Budiyantri</i>	145-159
DAMPAK PENGGABUNGAN BURSA EFEK JAKARTA DAN BURSA EFEK SURABAYA TERHADAP LIKUIDITAS PERDAGANGAN SAHAM DAN RASIO KEUANGAN	
<i>Hermanto, Hermanto Siregar, Roy Sembel, dan Rita Nuralina</i>	161-172
KINERJA EKONOMI PANGAN NASIONAL: DINAMIKA DAN REFORMULASI KEBIJAKAN	
<i>Lukman Adam</i>	173-192
JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN	
<i>Nidya Waras Sayekti</i>	193-209
DINAMIKA KEBIJAKAN DAN PENENTUAN TARIF LISTRIK PANAS BUMI: STUDI KASUS PLTP SIBAYAK	
<i>Ari Mulianta Ginting</i>	211-224
DAMPAK SPILLOVER PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI KALIMANTAN	
<i>Ernawati Pasaribu, D.S. Priyarsono, Hermanto Siregar, dan Ernan Rustadi</i>	225-238
KRIMINALITAS: SEBUAH SISI GELAP DARI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN	
<i>Davy Hendri</i>	239-252

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) Volume 5 Nomor 2 Desember 2014 kembali hadir di hadapan pembaca. Jurnal ini menyajikan beragam tulisan mengenai isu ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang mewarnainya. Tulisan *pertama* dibuka dengan tulisan yang berkaitan dengan kebijakan fiskal berupa realokasi subsidi BBM kepada sektor yang lebih produktif. Yuventus Effendi mengkaji dampak dari realokasi subsidi BBM ke subsidi lainnya, seperti subsidi bibit atau pupuk di sektor pertanian, sektor konstruksi, atau sektor layanan sosial. Simulasi ini sangat penting mengingat jenis subsidi BBM setiap tahunnya meningkat dan tidak terserap secara merata di masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan realokasi subsidi BBM ke sektor pertanian, khususnya sektor pertanian tanaman pangan, lebih menguntungkan bagi rumah tangga dengan penghasilan yang terendah. Sedangkan kebijakan memindahkan subsidi BBM ke sektor konstruksi hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemerintah serta dampak negatif yang relatif lebih besar kepada rumah tangga yang tergolong miskin.

Selain kebijakan fiskal, tulisan *kedua* mengangkat isu pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja sektor industri manufaktur di Indonesia. Eka Budiyanti berusaha memberikan pemahaman kepada pembaca tentang kekhawatiran semakin menurunnya output manufaktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, meskipun otoritas moneter sudah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan produksi industri dan pemanfaatan kapasitas sektor. Hasil analisis dengan menggunakan *Error Correction Model* (ECM) menunjukkan bahwa pengaruh tingkat suku bunga terhadap PDB manufaktur tidak terlalu besar, pemerintah dan Bank Indonesia tetap perlu menekan tingkat suku bunga yang dapat mendorong investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah lainnya yang juga menarik untuk dielaborasi adalah kebijakan menggabungkan pasar modal BEJ dan BES menjadi BEI. Tulisan *ketiga* oleh Hermanto dan kawan-kawan menduga bahwa penggabungan tersebut akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pasar modal di Indonesia, baik terhadap likuiditas perdagangan saham maupun kinerja keuangan. Hasil analisisnya sejalan dengan hipotesis awal, namun demikian upaya-upaya pemanfaatan aset yang lebih optimal ataupun peninjauan kembali aset yang belum terpakai untuk penciptaan pendapatan merupakan langkah-langkah yang juga penting untuk dilakukan.

Tulisan *keempat* berkaitan erat dengan eksistensi sektor pertanian di Indonesia. Lukman Adam mengawali analisisnya dengan mengangkat perubahan paradigma penyelenggaraan pangan khususnya pasca UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perubahan paradigma yang mencolok adalah upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, sedangkan paradigma sebelumnya lebih menekankan pada upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan yang diperlukan untuk dapat mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan adalah (a) peningkatan kapasitas produksi pangan, melalui ketersediaan lahan dan inovasi teknologi, (b) panen dan pascapanen, melalui penurunan kehilangan hasil, manajemen stok dan stabilisasi harga, (c) perbaikan infrastruktur pertanian, melalui pembangunan dan perbaikan sarana irigasi di seluruh Indonesia secara merata, (d) alokasi anggaran, melalui subsidi pupuk dan benih unggul, dan (e) dukungan kelembagaan, melalui reformulasi Bulog dan perbaikan koordinasi antarkementerian.

Beranjak dari produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, Nidya Waras Sayekti dalam tulisan *kelima* memberikan gambaran detail tentang fenomena produk halal yang telah menjadi *trend* konsumsi dan aspek kronologis penanganan produk halal pra dan pasca UU Jaminan Produk Halal. Kehadiran BPJPH yang telah diamanatkan oleh UU Jaminan Produk Halal tersebut memiliki implikasi positif dan juga negatif. Keberadaannya menjadi bagian yang krusial dalam menjamin kehalalan produk yang diproduksi dan yang beredar di masyarakat, baik dari sisi tanggung jawab sertifikasi maupun penegakan regulasinya.

Selain produk halal, masyarakat juga mengkonsumsi listrik untuk mendukung kehidupannya sehari-hari. Peran pemerintah dalam rangka menyediakan dan mendistribusikan listrik dengan tarif yang terjangkau adalah kewenangan yang tidak mudah. Tulisan *keenam* menganalisis salah satu sumber energi terbarukan, yaitu panas bumi, terkait dengan kebijakan dan penentuan tarif listrik panas bumi. Ari Mulianta Ginting

mengambil studi kasus di PLTP Sibayak sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait tarif listrik panas bumi selama ini masih relatif rendah dan belum dapat mendorong percepatan pengembangan panas bumi. Hal ini didukung dengan analisis kuantitatif penentuan tarif listrik PLTP Sibayak, di mana tarif jual keekonomiannya (BPP listrik) adalah sebesar Rp1.172,15/kWh, sedangkan PT. PLN membeli dengan tarif di bawah BPP.

Di Indonesia telah banyak tumbuh daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan. Tulisan *ketujuh* disajikan oleh Ernawati Pasaribu dan kawan-kawan. Tulisan ini mengisi celah kebaruan bahwa dampak *spillover* terhadap kinerja pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia yang diamati selama ini belum pernah sampai kepada pengujian secara statistik. Padahal pembuktian ada tidaknya dampak *spillover* secara empiris sangat diperlukan mengingat penerapan teori pusat pertumbuhan yang telah dilakukan, baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, masih menimbulkan pro dan kontra. Pendeteksian awal adanya hubungan ketergantungan spasial antara pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan dan daerah sekitarnya diuji menggunakan *Lagrange Multiplier Spatial Lag Dependent*. Hasilnya membuktikan bahwa pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi yang terjadi pada pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan secara signifikan memberikan dampak *spillover* negatif (*backwash effect*) terhadap wilayah sekitarnya. Dengan demikian, pengembangan wilayah pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan di masa mendatang harus diarahkan pada upaya peningkatan transaksi perdagangan antarwilayah agar terjadi dampak *spillover* positif dan diikuti pemerataan pertumbuhan antarwilayah di Kalimantan.

Spillover negatif salah satunya dapat dilihat dari adanya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Tulisan *kedelapan* yang ditulis oleh Davy Hendri, berusaha memotret isu sosial dari perspektif ekonomi. Artikel ini mengelaborasi kriminalitas dengan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Indonesia. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas pada gilirannya secara tidak langsung akan menuntut biaya sosial yang besar, salah satunya berupa kriminalitas yang makin meningkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi peningkatan tingkat kejahatan properti, pemerintah harus memiliki strategi yang unik untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di antara penduduk tersebut.

Demikian sekilas pengantar dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini. Besar harapan redaksi bahwa tulisan-tulisan tersebut dapat bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan bagi pembaca dan berkontribusi nyata dalam *policy making* bagi Anggota DPR RI saat menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Redaksi sangat terbuka atas saran dan masukan dari pembaca yang budiman, demi meningkatkan kualitas jurnal di masa mendatang.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Desember 2014
Redaksi Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2014

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Yuventus Effendi (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

DAMPAK REALOKASI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK: PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI

JEKP, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 131-143

Abstrak

Pada satu dekade terakhir, alokasi subsidi dalam APBN selalu memiliki proporsi yang signifikan. Dalam APBN-P tahun 2014, alokasi untuk subsidi meningkat secara signifikan dan lebih dari 50 persennya dialokasikan untuk subsidi BBM atau setara dengan Rp210 triliun. Kajian ini bertujuan untuk mensimulasikan dampak dari realokasi subsidi BBM ke subsidi lainnya, seperti subsidi bibit atau pupuk di sektor pertanian, sektor konstruksi, atau sektor layanan sosial. Simulasi ini sangat penting mengingat jenis subsidi BBM setiap tahunnya meningkat dan tidak terserap secara merata di masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah simulasi dengan menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008. Terdapat dua jenis analisis yang dilakukan yaitu analisis dampak *round by round* dan dekomposisi *multiplier* dengan menggunakan metode *Stone*. Kedua analisis ini bertujuan untuk memperkirakan dampak masing-masing skenario terhadap perekonomian. Terdapat beberapa skenario dalam penelitian ini. Skenario pertama menghapus subsidi BBM tanpa melakukan realokasi. Skenario kedua adalah realokasi subsidi BBM ke sektor pertanian khususnya sektor pertanian tanaman pangan. Skenario ketiga adalah memindahkan subsidi BBM ke sektor konstruksi. Skenario terakhir adalah realokasi subsidi BBM ke sektor layanan sosial. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario kedua lebih menguntungkan bagi rumah tangga dengan penghasilan yang terendah. Di sisi lain, skenario ketiga hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemerintah serta dampak negatif yang relatif lebih besar kepada rumah tangga yang tergolong miskin.

Kata kunci: subsidi, BBM, realokasi, fiskal, SNSE

Eka Budiyantri (P3DI Setjen DPR-RI)

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP KINERJA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 145-159

Abstrak

Sektor industri manufaktur merupakan salah satu motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, industri manufaktur juga memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja baru. Terdapat suatu kekhawatiran terhadap semakin meningkatnya penurunan output manufaktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, meskipun saat ini otoritas moneter sudah mulai melakukan beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi industri dan pemanfaatan kapasitas sektor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap output sektor industri manufaktur Indonesia, sehingga dapat diketahui instrumen moneter mana yang paling berpengaruh terhadap output manufaktur Indonesia. Dalam hal ini, dilakukan uji empiris menggunakan *Error Correction Model* (ECM) selama periode tahun 2001:01-2013:03, di mana data yang digunakan diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Adapun instrumen moneter yang digunakan antara lain tingkat suku bunga, *money supply*, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Hasil uji empiris menunjukkan bahwa *money supply* dan tingkat suku bunga signifikan memengaruhi PDB manufaktur. *Money supply* berpengaruh positif terhadap PDB manufaktur, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap PDB manufaktur. Dari kedua variabel tersebut, *money supply* memiliki pengaruh terbesar terhadap PDB manufaktur yaitu sebesar 0,26 persen, sedangkan tingkat suku bunga hanya berpengaruh sebesar 0,0054 persen terhadap PDB manufaktur. Karenanya, diperlukan perhatian yang lebih dari pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian *money supply* sehingga dapat meningkatkan output sektor industri di Indonesia. Walaupun pengaruh tingkat suku bunga terhadap PDB manufaktur tidak terlalu besar, pemerintah dan Bank Indonesia juga tetap perlu menekan tingkat suku bunga yang dapat mendorong investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: kebijakan moneter, sektor industri manufaktur, estimasi ECM

Hermanto (Institut Pertanian Bogor), Hermanto Siregar (Institut Pertanian Bogor), Roy Sambel (Institut Pertanian Bogor), dan Rita Nurmalina (Institut Pertanian Bogor)

DAMPAK PENGGABUNGAN BURSA EFEK JAKARTA DAN BURSA EFEK SURABAYA TERHADAP LIKUIDITAS PERDAGANGAN SAHAM DAN RASIO KEUANGAN

JEKP, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 161-172

Abstrak

Pasar modal di Indonesia telah berkembang menjadi suatu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan penggabungan (*merger*) pasar modal merupakan peristiwa bersejarah dalam perkembangan sektor keuangan dan investasi di Indonesia. Penggabungan lembaga pasar modal Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) kedalam satu bursa yang disebut Bursa Efek Indonesia (BEI), memiliki dampak yang luar biasa pada likuiditas perdagangan saham dan kinerja rasio keuangan. Penelitian ini membahas kondisi pasar saham dan kinerja rasio keuangan sebelum dan sesudah penggabungan. Metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi likuiditas perdagangan saham sebelum dan setelah penggabungan adalah (1) analisis variasi, (2) analisis kinerja rasio keuangan yang meliputi CR, OIOR, OEOR, NPM, ROE, ROA, TATO, dan EPS, dan (3) analisis faktor dengan pendekatan OLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggabungan pasar modal berdampak pada (1) likuiditas perdagangan saham mengalami penambahan yang menurun dan (2) perkembangan kinerja rasio keuangan setelah penggabungan lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum penggabungan. Walaupun demikian upaya-upaya pemanfaatan aset lebih optimal atau peninjauan kembali aset yang belum terpakai untuk penciptaan pendapatan juga penting dilakukan.

Kata kunci: BEI, likuiditas perdagangan saham, *merger*, rasio keuangan

Lukman Adam (P3DI Setjen DPR-RI)

KINERJA EKONOMI PANGAN NASIONAL: DINAMIKA DAN REFORMULASI KEBIJAKAN

JEKP, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 173-192

Abstrak

Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, paradigma penyelenggaraan pangan berubah menjadi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Paradigma tersebut berbeda dengan paradigma penyelenggaraan pangan dalam undang-undang sebelumnya, yang lebih menekankan pada upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pada periode tahun 2009 sampai tahun 2014, target swasembada dan swasembada berkelanjutan terhadap lima komoditas pangan strategis tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui keragaan produksi, ekspor, dan impor pangan di Indonesia, dan kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pangan. Rata-rata pertumbuhan produktivitas padi pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013 masih sangat rendah, bahkan untuk tebu terjadi penurunan pertumbuhan. Sedangkan komoditas jagung dan kedelai terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan produktivitasnya, namun dalam jumlah yang belum signifikan. Pada periode tahun 2009 sampai tahun 2012, neraca perdagangan komoditas pangan terjadi defisit dan pertumbuhan rata-rata impor beras mencapai 111,21 persen dan untuk jagung mencapai 104,22 persen. Kebijakan yang diperlukan untuk dapat mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan adalah (a) peningkatan kapasitas produksi pangan, melalui ketersediaan lahan dan inovasi teknologi, (b) panen dan pascapanen, melalui penurunan kehilangan hasil, manajemen stok dan stabilisasi harga, (c) perbaikan infrastruktur pertanian, melalui pembangunan dan perbaikan sarana irigasi di seluruh Indonesia secara merata, (d) alokasi anggaran, melalui subsidi pupuk dan benih unggul, dan (e) dukungan kelembagaan, melalui reformulasi Bulog dan perbaikan koordinasi antar kementerian.

Kata kunci: kapasitas produksi pangan, panen dan pascapanen, infrastruktur pertanian, alokasi anggaran, kelembagaan

Nidya Waras Sayekti (P3DI Setjen DPR-RI)

JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

JEKP, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 193-209

Abstrak

Produk halal kini menjadi *trend* konsumsi di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun nonmuslim. Tidak kurang dari USD650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. Menanggapi kebutuhan tersebut, MUI mendirikan LPPOM pada tahun 1989 untuk memberikan layanan pemeriksaan kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Di sisi lain, kehadiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang baru saja ditetapkan telah menjadi payung hukum pelaksanaan JPH di Indonesia. UU tersebut mengamatkan untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan kajian ini adalah menganalisis sistem JPH yang telah berjalan selama ini, menganalisis kelembagaan dalam pelaksanaan JPH sebelum dan sesuai UU JPH, serta menggambarkan potensi permasalahan dalam UU JPH. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI sejak tahun 2001, di mana sertifikat halal masih bersifat sukarela oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Keberadaan BPJPH memiliki beberapa kekuatan, antara lain penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi dan masa berlaku sertifikat halal menjadi 4 tahun. Sedangkan kelemahannya antara lain alur proses sertifikasi menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat serta masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kerjanya. Dalam implementasi, UU tersebut berpotensi menimbulkan masalah yaitu meningkatnya beban APBN/APBD, dominasi LPH, dan kontradiksi antarperaturan.

Kata kunci: jaminan produk halal, lembaga penyelenggara jaminan produk halal, kewenangan

Ari Mulianta Ginting (P3DI Setjen DPR-RI)

DINAMIKA KEBIJAKAN DAN PENENTUAN TARIF LISTRIK PANAS BUMI: STUDI KASUS PLTP SIBAYAK

JEKP, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 211-224

Abstrak

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berdampak kepada pertumbuhan kebutuhan energi. Selama ini kebutuhan energi dipenuhi oleh sebagian besar dari energi fosil. Padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan, seperti panas bumi relatif besar dan melimpah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui perkembangan tarif listrik, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui penentuan tarif listrik panas bumi dengan menggunakan sampel PLTP Sibayak, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tarif listrik panas bumi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003. Pada fase pertama, penetapan tarif listrik panas bumi belum sepenuhnya mempertimbangkan tarif keekonomian, di mana tarif masih sangat murah dan beragam antarWKP. Pada fase kedua, penetapan tarif listrik panas bumi sudah mulai menghitung keekonomian dari pengembangan panas bumi. Akan tetapi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait tarif listrik panas bumi selama ini masih relatif rendah dan belum dapat mendorong percepatan pengembangan panas bumi. Hal ini didukung dengan analisis kuantitatif penentuan tarif listrik PLTP Sibayak, di mana tarif jual keekonomiannya (BPP listrik) adalah sebesar Rp1.172,15/kWh, sedangkan PT. PLN membeli dengan tarif di bawah BPP. Sehingga dampak yang terjadi adalah pengembangan panas bumi di Indonesia mengalami stagnasi.

Kata kunci: panas bumi, tarif listrik panas bumi, kebijakan panas bumi

Ernawati Pasaribu (Pusdiklat BPS Jakarta Selatan), D.S. Priyarsono (Institut Pertanian Bogor), Hermanto Siregar (Institut Pertanian Bogor), dan Ernan Rustiadi (Institut Pertanian Bogor)

DAMPAK SPILLOVER PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI KALIMANTAN

JEKP, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 225-238

Abstrak

Dampak *spillover* terhadap kinerja pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia yang diamati selama ini belum pernah sampai kepada pengujian secara statistik. Padahal, pembuktian ada tidaknya dampak *spillover* secara empiris sangat diperlukan mengingat penerapan teori pusat pertumbuhan yang telah dilakukan baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masih menimbulkan pro dan kontra. Pengujian dampak *spillover* pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan secara khusus dilakukan untuk mengetahui apakah peranannya sebagai lumbung energi nasional seperti yang tertuang dalam Program MP3EI tidak akan menimbulkan *backwash effect* bagi daerah sekitarnya. Pendeteksian awal akan adanya hubungan ketergantungan spasial (*spatial lag dependent*) antara pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan dan daerah sekitarnya diuji menggunakan *Lagrange Multiplier Spatial Lag Dependent*. Hasilnya ternyata membuktikan bahwa pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi yang terjadi pada pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan secara signifikan memberikan dampak *spillover* negatif (*backwash effect*) terhadap wilayah sekitarnya. Pusat-pusat pertumbuhan secara signifikan berdampak *spillover* positif (*spread effect*) terhadap wilayah sekitarnya apabila pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan disertai dengan aliran ekonomi ke wilayah sekitarnya. Dengan demikian, pengembangan wilayah pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan di masa mendatang harus diarahkan pada upaya peningkatan transaksi perdagangan antarwilayah agar dampak *spillover* positif dapat terjadi seperti yang diharapkan dan pertumbuhan yang diikuti pemerataan antarwilayah di Kalimantan niscaya akan terwujud.

Kata kunci: *spillover effect*, pusat pertumbuhan, *spatial lag dependent*

Davy Hendri (IAIN Imam Bonjol, Padang)

KRIMINALITAS: SEBUAH SISI GELAP DARI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

JEKP, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 239-252

Abstrak

Artikel ini menguji hubungan tingkat ketimpangan pendapatan dan kejahatan properti di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sosial-ekonomi dari 33 provinsi selama tahun 2007-2011. Hubungan antara indeks Gini sebagai *proxy* ketimpangan pendapatan dan tingkat kejahatan properti diuji secara ekonometri dengan menggunakan model data panel efek tetap. Penulis menemukan fakta setelah dikontrol dengan berbagai variabel yang ada, ternyata ketimpangan pendapatan berkorelasi positif secara signifikan dengan kejahatan properti. Mengejutkan, bahwa ternyata menurut data yang ada, dalam konteks Indonesia, korelasi kedua variabel berpola *U-invers* (bentuk punuk). Dengan kata lain, setelah mencapai titik maksimum, peningkatan tingkat kejahatan properti mengalami penurunan begitu indeks Gini menjadi makin memburuk. Faktor lain yang menentukan perbedaan dalam tingkat kriminalitas yang diharapkan oleh literatur yang ada adalah proporsi penduduk perkotaan. Relasi dan pola hubungan indeks Gini dengan kriminalitas juga amat dipengaruhi oleh *initial value*. Intuisi dari hal ini adalah terjadi konvergensi dalam kriminalitas. Provinsi dengan indeks ketimpangan awal yang rendah akan saling berlomba untuk “mengejar” ketertinggalannya dengan provinsi lain yang telah memiliki indeks Gini dan kriminalitas tinggi. Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi noninklusif merupakan salah satu kontributor semakin memburuknya ketimpangan pendapatan. Temuan ini menyiratkan bahwa laju pertumbuhan yang tidak “berkualitas” pada gilirannya secara tidak langsung akan menuntut biaya sosial yang besar, salah satunya berupa kriminalitas yang makin meningkat. Jadi, dinamika data lapangan memberikan peringatan penting bahwa tidak ada jaminan bahwa daerah yang selama ini aman akan terus menikmati kondisi keamanan itu jika lalai dalam menyikapi fenomena ketimpangan pendapatan yang ada. Berdasarkan hal ini, tampak jelas bahwa untuk mengatasi peningkatan tingkat kejahatan properti, pemerintah provinsi harus memiliki strategi yang unik untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di antara penduduk sesuai dengan atribut daerahnya.

Kata kunci: kriminalitas, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 5 NO. 2, DECEMBER 2014

ISSN: 2086-6313

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Yuventus Effendi (Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance)

THE IMPACT OF FUEL SUBSIDY REALLOCATION: THE SOCIAL ACCOUNTING MATRICES APPROACH

JEKP, Vol. 5 No. 2, December 2014, pp. 131-143

Abstract

In the past decade, the allocation on subsidies spending in the state budget is always significant, in particular the proportion and value of the fuel subsidy which undeniably increases every year. In the 2014 State Budget, the allocation for the subsidies increased significantly in which more than 50 percent of it is allocated to the fuel subsidy or equivalent to 210 trillion IDR. This study aims to simulate the impact of the fuel subsidy reallocation to the other kind of subsidies such as seed or fertiliser subsidy in the agricultural sector, construction sector, or any other social services sector. This simulation is crucial due to the nature of fuel subsidy which increases every year and it is unequally distributed to the society. Methodology used in this study is a simulation based on the 2008 Social Accounting Matrices (SAM). Two types of analysis are conducted in this study, namely the round by round effect and the Stone multiplier decomposition method. These two types of analysis are aimed to predict the impacts of the following each scenario to the economy. First, phasing out the fuel subsidy without any reallocation. Second, reallocation of the fuel subsidy to the agricultural sector, in particular the crop farming sector. Third, fuel subsidy reallocation to the construction sector. Finally, the last scenario is to reallocate the fuel subsidy to the social services sector. The results reveal that the second scenario is more beneficial to the households with lowest income. Meanwhile, on the other hand, the third scenario will only benefit the firms and government, and even with more negative impacts on the poor households.

Keywords: *subsidy, fuel, reallocation, fiscal, social accounting matrices*

Eka Budiyantri (P3DI Setjen DPR-RI)

**THE EFFECT OF MONETARY POLICY
ON MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR PERFORMANCE IN INDONESIA**

JEKP, Vol. 5 No. 2, December 2014, pp. 145-159

Abstract

The manufacturing industry sector is one of the driving forces for economic growth. In addition, the manufacturing industry also plays an important role in the creation of new jobs. There is a growing concern to the increasing decline of manufacturing output in Indonesia recent years; although this time the monetary authorities have started making some strategic efforts aimed to increase industrial production and sectoral utilization of the capacity. This study will discuss how far the effect of monetary policy would be on manufacturing industry output in Indonesia. Therefore, it can then be known which monetary instruments that most affect on the manufacturing output in Indonesia. To this case, this study conducted an empirical test using the Error Correction Model (ECM) for the period of 2001:01-2013:03, of which the data used is obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and Bank Indonesia. Monetary instrument used includes the interest rate, money supply, exchange rate, and the rate of inflation. The empirical results showed that the money supply and interest rates significantly affect manufacturing GDP. Money supply has positive influence on the manufacturing GDP, while interest rates negatively affect the manufacturing GDP. From these two variables, the money supply has the greatest influence on the manufacturing GDP that is equal to 0.26 percent, while the interest rate only affected to only 0.0054 percent on the manufacturing GDP. Hence, the government and Bank Indonesia need to more pay attention to the controlling of the money supply so as to increase the output of the industrial sector in Indonesia. Although the effect of the interest rate on GDP manufacturing is not too large, the government and Bank Indonesia also still need to set the interest rate that can encourage investment, which in turn will boost economic growth.

Keywords: monetary policy, industrial manufacturing sector, ECM estimate

Hermanto (Bogor Agricultural University), Hermanto Siregar (Bogor Agricultural University), Roy Sambel (Bogor Agricultural University), and Rita Nurmalina (Bogor Agricultural University)

**THE IMPACT OF THE MERGER OF JAKARTA STOCK EXCHANGE AND
SURABAYA STOCK EXCHANGE ON STOCK TRADING LIQUIDITY AND FINANCIAL RATIO**

JEKP, Vol. 5 No. 2, December 2014, pp. 161-172

Abstract

The capital market in Indonesia has grown and become into a financial institution which has played a strategic role for economic development. The merger of capital market policy as well as stock market policy become the historical event in the development of the financial sector and investment in Indonesia. The merger of Jakarta Stock Exchange (JSX) and Surabaya Stock Exchange (SSX) into one stock exchange called Indonesia Stock Exchange, has tremendous impacts on stock trading liquidity and financial ratio performance. The research discussed the condition of stock market and financial ratio performance before and after the merger. Methods used to analyze the stock of liquidity before and after the merger are as follows (1) the variations, (2) the financial performance, including CR, OIOR, OEOR, NPM, ROA, ROE, TATO, and EPS, and (3) factor analysis with OLS approach. The results show that the impacts of merger of capital market liquidity on (1) trade shares have had a diminishing increase and (2) development of financial performance ratio after merger is better than before. However, the optimalizations of assets utilization or unused assets reconsideration are also crucial.

Keywords: IDX, merger, stock trading liquidity, financial ratio

Lukman Adam (P3DI Setjen DPR-RI)

NATIONAL FOOD ECONOMIC PERFORMANCE: DYNAMICS AND POLICY REFORMULATION

JEKP, Vol. 5 No. 2, December 2014, pp. 173-192

Abstract

In the post-enactment of Law Number 18 of 2012 on Food, paradigm of food organizing shifts toward to the achievement of sovereignty, sufficiency and the security of food. The paradigm is different from the previous one laid down in the previous legislation which gives, a greater emphasis on efforts to fulfill the basic human needs based on independence and do not contradict to the public belief. In the periods of 2009 to 2014, target of self-sufficiency and self-sustainability of the five strategic food commodities were not achieved. Therefore, it is necessary to study the production performance, export and import of food in Indonesia, and the policies needed to achieve the objectives of sustaining the food. In the periods of 2009 to 2013, the average growth of rice productivity was very low, even the decline also happened to sugar cane. While the average growth of productivity for corn and soybean increased, but the amount is still not significant. In the periods of 2009 to 2012, the trade balance of food commodities was deficit, and the average growth for rice import reached 111.21 and 104.22 percent for corn. Thus, the following policies are needed to target (a) food production capacity, through the availability of land and technological innovation, (b) harvest and post-harvest, through the reduction of yield loss, stock management and price stabilization, (c) agricultural infrastructure, through the development and improvement of irrigation facilities evenly throughout Indonesia; d) budget allocation, through subsidies of fertilizers and seed, and (e) institutional support, through the reformulation of Bulog and coordination between ministries.

Keywords: food production capacity, harvest and post-harvest, agricultural infrastructure of food, budget allocation, institutional

Nidya Waras Sayekti (P3DI Setjen DPR-RI)

WARRANTY OF HALAL PRODUCT OF INSTITUTIONAL PERSPECTIVE

JEKP, Vol. 5 No. 2, December 2014, pp. 193-209

Abstract

Halal products have become a trend of consumption worldwide, both in the moslem and nonmoslem countries. No less than USD650 million halal product transactions occur every year. As a predominantly moslem country, Indonesia should pay attention to the needs of citizens in the consumption of halal products, which one of them may be done through the provision of halal assurance of any products consumed. Responding to this need, MUI established LPPOM in 1989 providing an inspectional service to halal food products, pharmaceuticals, and cosmetics. The Act of Halal Product Assurance (Act of JPH) which is newly enacted becomes a new legal framework for the enforcement of JPH in Indonesia as well as the mandate to the establishment of Halal Products Assurance Institution (BPJPH). The purposes of this study are to analyze the JPH system that has been in place today, to analyze the institutional framework for the implementation of JPH before and in accordance with The Act of JPH, and illustrates the potential problems may occur under the enacted-law. The study used qualitative descriptive method. The result shows that the government authorizes the implementation of JPH to LPPOM MUI since 2001, halal certification is still voluntary, and the validity period only for 2 years. The existence BPJPH has some strengths, among others, the implementation of JPH and the presence of LPH be more organized, the halal certificate valids for 4 years only. On the other hand, the weakness can also be identified among others are the certification process becomes long and bureaucratized as it involves many parties/institution, the accountability and transparency performance of JPH still need to be regulated. In its implementation, the law has the potential to cause problems such as an increasing cost of APBN/APBD, LPH domination, and the contradictions among related rules.

Keywords: halal product assurance, halal product assurance management institution, halal examiner, authority

Ari Mulianta Ginting (P3DI Setjen DPR-RI)

**POLICIES DYNAMIC AND DETERMINATION OF GEOTHERMAL ELECTRICITY TARIFF:
CASE STUDY AT THE PLTP OF SIBAYAK**

JEKP, Vol. 5 No. 2, December 2014, pp. 211-224

Abstract

The Indonesian economic growth has shown an increasing trends in recent years. The economic growth has an impact to the growth of demand for energy accordingly. This situation eventually challenges the growth in itself as the energy supply so far is fulfilled mostly by fossil based energy, despite Indonesia has an abundant renewable energy potential, such as geothermal energy in this case. This research uses qualitative and quantitative methods. The qualitative method used to know the development of geothermal tariff. While the quantitative method used to determine electricity tariff of geothermal energy using a sample of the Sibayak Geothermal Power Plant (the PLTP of Sibayak), North Sumatera. This research has shown that the development of geothermal tariff can be divided into 2 phases, before and after the enactment of the Law No. 27 of 2003 on Geothermal. Before the enactment of the law, geothermal electricity tariffs have not fully considered the economic tariff, where rates were still very low and varied between the mining-operation areas (WKP). After the enactment of the law, the geothermal electricity tariff has been set to also calculate the economics aspect of geothermal energy developments. However, the geothermal electricity tariff is still relatively low and hence it has not been able to accelerate the development of geothermal energy. This result is supported by the analysis of quantitative of electricity price determination of the PLTP of Sibayak, the economic price or the economic electricity production cost of geothermal power plants (BPP) is Rp1.172,15, meanwhile PT. PLN buys it at the price below the BPP. Thus the impact is that geothermal development in Indonesia got stagnated.

Keywords: geothermal energy, geothermal electricity tariff, geothermal policy

Ernawati Pasaribu (Pusdiklat BPS Jakarta Selatan), D.S. Priyarsono (Bogor Agricultural University), Hermanto Siregar (Bogor Agricultural University), and Ernan Rustiadi (Bogor Agricultural University)

SPILLOVER EFFECT OF GROWTH CENTERS IN KALIMANTAN

JEKP, Vol. 5 No. 2, December 2014, pp. 225-238

Abstract

Spillover effect towards the performance of the observed growth centers in Indonesia has not been up to statistical testing. Whereas, the empirical analysis on the spillover effect is important since the application of growth centers theories that has been done by developed countries and also by developing countries still raise pro-cons. Examination on spillover effect of growth centers in Kalimantan specifically has been done in order to reveal whether its contribution as a National Energy Stocks as mentioned in MP3EI program does not caused backwash effect for the surrounding areas. Early investigation of existence of spatial lag dependent between growth centers in Kalimantan and its surrounding areas was tested using Lagrange Multiplier Spatial Lag Dependent. It proved that output growth, labor growth, and investment growth which happened in the growth centers in Kalimantan significantly had negative spillover effect (backwash effect) to their surrounding areas. Growth centers have a significant positive spillover effect (spread effect) to their surrounding areas if output growth, labor growth, and investment growth are accompanied by economic flow to the surrounding areas. Thus, in future the development of the growth centers in Kalimantan should be directed to the efforts to increase inter-regional trade transactions so that positive spillover effect (spread effect) may occurs as expected, and the growth with equity among regions in Kalimantan will be happened.

Keywords: spillover effect, growth centers, spatial lag dependent

Davy Hendry (IAIN Imam Bonjol, Padang)

CRIME: A DARK SIDE OF INCOME INEQUALITY

JEKP, Vol. 5 No. 2, December 2014, pp. 239-252

Abstract

This article examines the relationship of income inequality and property crime in Indonesia. Analyses were performed using socio-economic data of 33 provinces during 2007-2011. The relationship between Gini index as a proxy for income inequality and property crime rates were tested using econometric panel data fixed effects models. The authors found after the fact controlled by a variety of variables, it turns out income inequality significantly positively correlated with property crime. Surprisingly, that turns out in according to available data, in the context of Indonesia, the correlation between the two variables patterned U-inverse (hump-shaped). In other words, if Gini index get worse then crime rates should be increased instead of decreased. Another factor that determines the difference in the crime rate expected by the existing literature is the proportion of the urban population. Relationships and patterns of criminality's association with Gini index is also strongly influenced by the it's initial value. The intuition of this, there is convergence in the crime. Provinces with low initial inequality index will compete to "chase" the gap with other provinces that already have a high Gini index and crime rate. The analysis also shows that non-inclusive economic growth is one of the contributors to the worsening inequality income. The fact also implies that if the growth rate is not "qualified" in turn indirectly will demand a great social cost, one form of criminality that increasingly rising. Thus, the dynamics of the field data provide important reminder that there is no guarantee that the area is safe will continue to enjoy it if negligent in addressing the phenomenon of income inequality that exists. Base on this, it seems clear that in order to cope with the increase in property crime rates, the provincial government should have a unique strategy to reduce income inequality among the population according to the attributes of their region.

Keywords: *property crime, income distribution, economic growth*